

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN MASALAH PELINTAS BATAS ILEGAL DI PLBN MOTAAIN

Gratia Victoria Tae<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[gvtim3086@gmail.com](mailto:gvtim3086@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pelintas batas ilegal di wilayah PLBN Motaain serta motif yang mendorong masyarakat melakukan pelintasan secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edwards III, mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan mengalami hambatan pada akses informasi. Sumber daya manusia dan fasilitas masih terbatas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi meskipun terkendala situasi di lapangan. Koordinasi antarlembaga dalam struktur birokrasi masih belum optimal. Motif pelintas batas ilegal didominasi oleh faktor kekeluargaan, kebutuhan ekonomi, dan kondisi darurat.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Implementasi, Pelintas Batas Ilegal, PLBN, Perbatasan

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of Indonesian government policies in handling illegal border crossings in the Motaain Border Crossing (PLBN) area and the motives that drive people to cross illegally. This study used a descriptive qualitative approach using interview, observation, and documentation techniques. The results were analyzed using George C. Edwards III's implementation theory, covering communication, resources, disposition/attitude, and bureaucratic structure. The results indicate that policy communication faces obstacles in access to information. Human resources and facilities remain limited. The disposition of implementers demonstrates a high level of commitment despite constraints on the ground. Inter-agency coordination within the bureaucratic structure remains suboptimal. The motives of illegal border crossings are dominated by family factors, economic needs, and emergency situations.*

**Keywords:** Policy, Implementation, Illegal Border Crossing, PLBN, Border

### PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste khususnya di PLBN Motaain menghadapi tantangan serius terkait aktivitas pelintas batas ilegal. Keberadaan hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat dua negara ini menjadi alasan utama tingginya mobilitas lintas

negara, sering kali tanpa dokumen resmi. Fenomena ini menimbulkan dampak terhadap keamanan, sosial, dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk mengelola dan menangani permasalahan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat PLBN Motaain, petugas imigrasi, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi dan observasi langsung. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan teori implementasi George C. Edwards III serta teknik analisis SWOT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan media sosial. Namun, hambatan seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya pemahaman masyarakat, dan kendala bahasa untuk warga Timor Leste mempersulit efektivitas penyampaian informasi.

### **2. Sumber Daya**

Terdapat kekurangan pada jumlah petugas, anggaran, serta infrastruktur. Kantor Imigrasi Atambua hanya memiliki 126 pegawai yang tersebar di berbagai pos lintas batas.

### **3. Disposisi/Sikap**

Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi. Namun, beban kerja tinggi dan fasilitas terbatas mempengaruhi kinerja mereka.

### **4. Struktur Birokrasi**

Koordinasi antar instansi seperti Imigrasi, Bea Cukai, TNI/Polri, dan BNPP sudah berjalan, tetapi masih perlu optimalisasi.

### **5. Motif Pelintas Batas Ilegal**

Motif utama mencakup faktor kekeluargaan lintas negara, kebutuhan ekonomi, serta kondisi darurat. Jalur tikus masih menjadi pilihan bagi masyarakat karena lebih mudah dan cepat.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pelintas batas ilegal di PLBN Motaain masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari komunikasi, keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi birokrasi. Perlunya penguatan sumber daya, peningkatan infrastruktur, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat menjadi kunci perbaikan implementasi kebijakan ke depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: CQ Press.  
Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media.  
Hukumonline.com (2022). "12 WNA Timor Leste Dideportasi".  
Seran, F. (2019). "Fenomena Pelintas Batas Ilegal Indonesia-Timor Leste".  
Peraturan Kementerian Pertahanan No. 13 Tahun 2014